



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR *sy* TAHUN 2023
TENTANG
FINALIS TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG FINALIS TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023; dan
- b. Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Urutan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran disusun berdasarkan urutan abjad instansi dan bukan merupakan urutan peringkat.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 541 TAHUN 2023

TENTANG

FINALIS TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023

A. TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
A. KEMENTERIAN				
1	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM), dari BUMN untuk UMKM Indonesia	Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penciptaan Ekosistem Digital Untuk Peningkatan dan Percepatan Layanan Pemasangan Listrik Melalui SIUJANG GATRIK	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Meneral	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	FUJI LESTARI (<i>Fish-Apartment</i> Untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri)	Balai Besar Penangkapan Ikan	Pemberdayaan Masyarakat
4	Kementerian Keuangan	<i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i> : Platform Investasi Sosial dan Wakaf Produktif Berbasis Wakaf Uang Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Direktorat Pembiayaan Syariah	Inklusi Sosial
5	Kementerian Keuangan	CEISA Barang Kiriman (<i>Consignment Note</i>): kemudahan Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	Tata Kelola Pemerintahan
6	Kementerian Keuangan	Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA)	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
7	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	Pengelolaan Data dan Informasi Tanggap Bencana Terhadap Infrastruktur Melalui Sistem Informasi Tanggap Bencana (SITABA)	Pusdatin	Ketahanan Bencana
8	Kementerian Pertanian	<i>Biochar Three in One (BIOTRON)</i>	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, BPPSDM Pertanian	Energi dan Lingkungan Hidup

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
9	Kementerian Sosial	BARIS DITEBAS (Barista Disabilitas Terobos Stigma Keterbatasan)	Sentra Wyata Guna Bandung	Inklusi Sosial
B. LEMBAGA				
10	Badan Informasi Geospasial	Pemanfaatan Nama Rupabumi dalam SINAR pada Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia	Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim	Tata Kelola Pemerintahan
11	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BERPENDAR (Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Izin Edar)	BBPOM di Yogyakarta	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
12	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Membangun Akuntabilitas Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Pengentasan Kemiskinan
13	Badan Pusat Statistik	Indonesia Data Hub (INDAH)	Direktorat Sistem Informasi Statistik	Tata Kelola Pemerintahan
14	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Malam Batik Sawit	Pusat Riset Agroindustri-Organisasi Riset Pertanian dan Pangan	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
15	Badan Standardisasi Nasional	<i>E-Learning</i> Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pendidikan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
16	Kepolisian Negara RI	Polisi Hebat Semarang (LIBAS)	Polrestabes Semarang	Penegakan Hukum
C. PROVINSI				
17	Pemerintah D. I. Yogyakarta	MOMENKU SIAP BERKEMAS (Model Manajemen Kelompok Usaha Siswa Partisipasi Berantas Kemiskinan Masyarakat)	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Pendidikan
18	Pemerintah Provinsi Bali	CGO (<i>Credit Guarantee Officer</i>)	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
19	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jakarta <i>Evolution</i> (JAKEVO): Solusi Pelayanan Perizinan yang Lebih Cepat, Terjangkau dan Transparan	DPMPTSP	Tata Kelola Pemerintahan
20	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	LAPOR PAK (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) TANGKAS TUNTAS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan	Inklusi Sosial
21	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	TENPINA (Tenda Pendidikan Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketahanan Bencana
22	Pemerintah Provinsi NTB	Revitalisasi BLK melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePADu Plus)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
23	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	SIPENGOLAH LIMBAH B3 (Sistem Pelayanan Administrasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)	UPT Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tata Kelola Pemerintahan
24	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	LILAKU 4 GH (Limbah Layakku menuju <i>Green Hospital</i>)	RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi	Energi dan Lingkungan Hidup
D. KABUPATEN				
25	Pemerintah Kab. Aceh Barat	AMUNISI LENGKAP (Ayo Imunisasi Dasar Lengkap)	UPTD Puskesmas Meureubo	Kesehatan
26	Pemerintah Kab. Badung	Keamanan, Kenyamanan dan Kemudahan Akses Layanan SITA (Sistem Informasi Pariwisata) di Kabupaten Badung Berbasis Digital	Dinas Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
27	Pemerintah Kab. Balangan	PuLPenDaCil (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan
28	Pemerintah Kab. Banggai	<i>Ambulance</i> Dering Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Kesehatan
29	Pemerintah Kab. Banggai Laut	DUKCAPIL MENYAPA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
30	Pemerintah Kab. Bangka	REKLAMASI LAUT	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Energi dan Lingkungan Hidup
31	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan)	Dinas Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
32	Pemerintah Kab. Bangkalan	DUKATI (Duplikasi Keanekaragaman Hayati)	Dinas Lingkungan Hidup	Energi dan Lingkungan Hidup
33	Pemerintah Kab. Bantaeng	SAMAWAKI (Sistim Aplikasi Menikah Bawa Pulang KK, KTP dan Buku Nikah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan
34	Pemerintah Kab. Banyuwangi	Layanan Inklusif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dengan Pendekatan Hati (LEBUR SEKETI)	Dinas Pendidikan	Pendidikan
35	Pemerintah Kab. Banyuwangi	SIMPLING (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Laboratorium Lingkungan)	UPTD Laboratorium Lingkungan-Dinas Lingkungan Hidup	Energi dan Lingkungan Hidup
36	Pemerintah Kab. Batubara	ECO ENZYME	Kantor Camat Sei Suka	Energi dan Lingkungan Hidup

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
37	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	Inovasi Gardu Penangkis (Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan)	Bappelitbangda	Pengentasan Kemiskinan
38	Pemerintah Kab. Bima	DESA UNGGUL (Pertanian Sensitif Gizi)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketahanan Pangan
39	Pemerintah Kab. Bintan	Kampung Kerupuk Modern	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
40	Pemerintah Kab. Blitar	WINGS (<i>Wlingi Emergency Medical Services</i>)	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	Kesehatan
41	Pemerintah Kab. Buleleng	Buleleng Kelola Sampah Anorganik melalui Bank Sampah (BULAN MELAH)	Dinas Lingkungan Hidup	Energi dan Lingkungan Hidup
42	Pemerintah Kab. Deli Serdang	Demi Sepeda Bagus: Sebuah Model Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui PKBM, Inklusi Sosial, Pendidikan Keluarga, Kolaborasi Stakeholder dan Pembelajaran Berdiferensiasi di Kabupaten Deli Serdang	Dinas Pendidikan	Inklusi Sosial
43	Pemerintah Kab. Gorontalo	Si Prima (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Identitas Masyarakat)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
44	Pemerintah Kab. Gresik	AKADEMI PETIR (Akademi untuk Penderita TB Resisten Obat)	RSUD Ibnu Sina Gresik	Kesehatan
45	Pemerintah Kab. Grobogan	BERAMAL (Berikan Akta Kematian dan Akta Kelahiran)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan
46	Pemerintah Kab. Jembrana	Jembrana KEDAS	Dinas Lingkungan Hidup	Energi dan Lingkungan Hidup
47	Pemerintah Kab. Jombang	Ekowisata Wonosalam Permata Hati (Perlindungan Mata Air dan Hutan Berbasis Partisipasi)	Dinas Lingkungan Hidup	Energi dan Lingkungan Hidup
48	Pemerintah Kab. Karanganyar	SI DEMEN TOMAT TERASI (Sistem Deteksi Dini dan Pemantauan Tuberkulosis Mandiri, Terpadu dan Terintegrasi)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
49	Pemerintah Kab. Karimun	PANDU BIDAN SELAMAT (Pelayanan ANtenatal Terpadu Buat Ibu Dan ANak SEhat dan seLAMAT)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
50	Pemerintah Kab. Kebumen	MIE KERITING (Makanan Instan cEgah KERdil dan stunTING)	Puskesmas Kebumen II	Kesehatan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
51	Pemerintah Kab. Kediri	SIDAPOTIK (Sistem Informasi Data Potensi Investasi Terintegrasi Kabupaten Kediri)	DPMPTSP	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
52	Pemerintah Kab. Klungkung	POKOK (Pondok Kompos Osaki Klungkung)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Energi dan Lingkungan Hidup
53	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Kawasan Masyarakat Pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan (Kampung Raja Mapan)	Kecamatan Samboja	Ketahanan Pangan
54	Pemerintah Kab. Lamongan	Pasar <i>Online</i> Lamongan (POL)	Perusahaan Daerah Pasar	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
55	Pemerintah Kab. Malang	PUTIKSARI (Kampung Tematik Wonosari Berseri)	Kecamatan Wonosari	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
56	Pemerintah Kab. Mojokerto	TUMBAS (Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
57	Pemerintah Kab. Nias Utara	Pel KB Mas (Pelayanan Kesehatan Bergerak Melalui <i>Telemedicine</i> dan Pengobatan Gratis)	UPTD Puskesmas Alasa Talumuzoi	Kesehatan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
58	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Kampung Koperasi di Desa Wanabhakti	Dinas Koperasi UKM	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
59	Pemerintah Kab. Pacitan	BALA DEWA (Beasiswa Anak Sekolah Desa Sawahan)	Desa Sawahan	Pemberdayaan Masyarakat
60	Pemerintah Kab. Pamekasan	SANG SULTAN (Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan
61	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Layanan <i>Online</i> iCore Disdukcapil Pangkep	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan
62	Pemerintah Kab. Pasuruan	Pustaka Jangkau Keluarga (PUJANGGA)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pendidikan
63	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	KANDA KU RINDU (Pernikahan Dapat Dokumen Kependudukan Diantar Dukcapil)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan
64	Pemerintah Kab. Pinrang	SIBER (<i>Skilled Breeder</i>)	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Ketahanan Pangan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
65	Pemerintah Kab. Sambas	INSANAK (Internet Pedesaan Akomodatif)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat
66	Pemerintah Kab. Sidoarjo	INOVASI E-REBON	Dinas Perikanan	Pengentasan Kemiskinan
67	Pemerintah Kab. Sidoarjo	KOPI PAHIT (Kompilasi Inovasi Porong Cegah dan Atasi <i>Stunting</i>)	Puskesmas Porong	Kesehatan
68	Pemerintah Kab. Soppeng	SUTASOMA (Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Inklusi Sosial
69	Pemerintah Kab. Sukoharjo	Semangat Bangun Desa Melalui Program Kampung Iklim (SEMBADA PROKLIM)	Dinas Lingkungan Hidup	Energi dan Lingkungan Hidup
70	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	Gotong Royong Menuju Tuntas Lima Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat
71	Pemerintah Kab. Sumedang	Angka <i>Stunting</i> Sumedang Turun 20 Persen Dalam Waktu 3 Tahun dengan Aplikasi SIMPATI	BAPPPPEDA	Kesehatan
72	Pemerintah Kab. Sumenep	SiKaPal (Sistem Keamanan Pelayaran)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketahanan Bencana

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
73	Pemerintah Kab. Tegal	RUMAH PELITA (Pemulihan Gizi Balita)	Puskesmas Kedungbanteng	Kesehatan
74	Pemerintah Kab. Trenggalek	Keluarga Sehat Yang Beruntung (KSYB)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Kesehatan
75	Pemerintah Kab. Tuban	KASI PASTA GIGI (Optimalisasi Edukasi Paska Ekstraksi Gigi melalui Pemberian Kartu Instruksi Paska Ekstraksi Gigi)	RSUD dr. R. Koesma	Kesehatan
76	Pemerintah Kab. Tulungagung	Kesehatan Ibu Hamil dan Anak <i>Online</i> dan <i>Home Visite</i> (KILAO HATI)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
77	Pemerintah Kab. Wonosobo	Mengolah Kol Segar, Maksimalkan Potensi	SMP Negeri 1 Wonosobo	Pendidikan
E. KOTA				
78	Pemerintah Kota Ambon	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Musik	Dinas Pendidikan	Pendidikan
79	Pemerintah Kota Bandung	Bandung <i>Emergency Application Support</i> (BEAS)	Dinas Kesehatan	Kesehatan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
80	Pemerintah Kota Batu	Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tata Kelola Pemerintahan
81	Pemerintah Kota Bima	KAWANGI KOPI TB (Kawara Angi Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
82	Pemerintah Kota Cimahi	BIDIK <i>Co-Space</i> Opti (Optimalisasi Bisnis Digital Kreatif di <i>Co-Working Space</i>)	UPTD Cimahi <i>Techno Park</i>	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
83	Pemerintah Kota Denpasar	RADITYA (Radio Inklusi Menuju Kota Denpasar Maju dan Jaya)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Inklusi Sosial
84	Pemerintah Kota Kediri	EMAS LIMA GRAM (<i>English Massive Lintas Masyarakat Gratis Maksimal</i>) Kota Kediri	Dinas Pendidikan	Pendidikan
85	Pemerintah Kota Makassar	Kelas Berbintang	UPT SPF SD Negeri Bawakaraeng I	Pendidikan
86	Pemerintah Kota Malang	JARIK MA'SITI (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa)	SMP Negeri 10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan
87	Pemerintah Kota Mojokerto	CANTING GULA MOJO (CegAh stuNTING, Gerak UngguL)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
		pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)		
88	Pemerintah Kota Padang Panjang	<i>Smart Water Management System</i> (SWMS) PDAM Kota Padang Panjang	PDAM	Energi dan Lingkungan Hidup
89	Pemerintah Kota Payakumbuh	SITARANG (Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tata Kelola Pemerintahan
90	Pemerintah Kota Pekalongan	BEMBI NAIK SI BEMO (Bendan <i>Emergency Mobile</i> Penanganan Intensif Kegawatdaruratan Gratis Terintegrasi Bendan Mobile)	RSUD Bendan	Kesehatan
91	Pemerintah Kota Pontianak	PIONIRS - Pelayanan <i>Online</i> Dari Rumah Sendiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan
92	Pemerintah Kota Salatiga	DATAKU: "Menuju Satu Data Salatiga"	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tata Kelola Pemerintahan
93	Pemerintah Kota Semarang	PANGERAN DIPONEGORO (Pencapaian Program UHC Kota Semarang 100% Didukung dengan Peran Lintas Program dan Lintas Sektor Secara Gotong Royong)	Dinas Kesehatan	Kesehatan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
94	Pemerintah Kota Surabaya	SAYANG WARGA (Sistem lAYanan dan pendAmpinGan WARGa surabayA)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
95	Pemerintah Kota Surakarta	Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) - (Aksi Mengatasi Putus Sekolah Warga Miskin dan Rentan Sosial)	Dinas Pendidikan	Pendidikan
96	Pemerintah Kota Tangerang	Lansia Sumringah (Semua Mandiri, Bugar dan Bahagia)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
97	Pemerintah Kota Tarakan	Si Dokter Serasi	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	Kesehatan
98	Pemerintah Kota Yogyakarta	<i>Jogja Smart Service (JSS)</i>	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Tata Kelola Pemerintahan
F. BUMN				
99	PT Taspen (Persero)	<i>TOOS - Taspen One Hour Online Service</i>	<i>Services and Marketing Division</i>	Tata Kelola Pemerintahan

B. TOP 15 KELOMPOK KHUSUS INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
A. KEMENTERIAN				
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	MAGMA Indonesia (<i>Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia</i>)	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Ketahanan Bencana
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melalui PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Energi dan Lingkungan Hidup
B. LEMBAGA				
3	BPJS Kesehatan	Reformasi Birokrasi Layanan Publik melalui <i>Integrated System for Traffic Accidents (INSIDEN)</i>	Kedeputian Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat	Kesehatan
C. PROVINSI				
4	Pemerintah Provinsi D. I. Yogyakarta	Melintasi Batas Ruang Kelas Bersama Jogja Belajar <i>Class</i>	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	Pendidikan
5	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	CEK DAN SADARI (Cegah Kanker Serviks dengan Mobil Deteksi Kanker HIBISCUS dan Motor BUNGA INDAH)	UKPD Puskesmas Kecamatan Senen Dinas Kesehatan	Kesehatan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
6	Provinsi Kalimantan Utara	PROLANTERAKU (Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
D. KABUPATEN				
7	Pemerintah Kab. Badung	Pengembangan Potensi Pertanian di Badung Utara (Asparagus Ditanam Ekonomi Mapan)	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemberdayaan Masyarakat
8	Pemerintah Kab. Bangka	GERBANG LESTARI (Gerakan Pembangunan Melestarikan Lingkungan)	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Energi dan Lingkungan Hidup
9	Pemerintah Kab. Bantul	Gelimasjiwo menuju SIMANTAP SEJAGAT (Sistem Manajemen Terpadu Kesehatan Jiwa Jaga Masyarakat)	Puskesmas Kasihan II	Kesehatan
10	Pemerintah Kab. Gresik	SIGAP-RTLH (Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni)	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengentasan Kemiskinan
11	Pemerintah Kab. Grobogan	Rumah Kedelai Grobogan (RKG)	Dinas Pertanian	Ketahanan Pangan
12	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	TELAH BERKEMAS (Tetap Lestari Harus Berdayakan Masyarakat)	Dinas Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat

E. KOTA				
13	Pemerintah Kota Madiun	DOPARI SAKATU (DONGENG di PAgI haRI setiap selaSA KAmis dan sabTU)	SDN 02 Mojorejo	Pendidikan
14	Pemerintah Kota Mojokerto	GAYATRI (Gerbang laYanan informAsi Terpadu dan terintegRasi)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan
15	Pemcrintah Kota Tegal	LADIS SONG MALAM DISEGANI (Layanan dengan Inovasi Simultan bagi Pengasong dan Masyarakat Alam dengan Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pengembangan Literasi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS